



Kabupaten
Tasikmalaya

2025

Perubahan Rencana Kerja

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah



Komplek Perkantoran
Jl. Sukapura V , Sukaasih, Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505
Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id
SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 000.9.2/KEP.26/BPKPD/2025
LAMPIRAN :

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja BPKPD Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.
12. 1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);

- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
- 20. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 146 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 24);
- 24. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0018 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- 25. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021– 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 - KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025; dan
 - 2. Merumuskan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 8 APRIL 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,

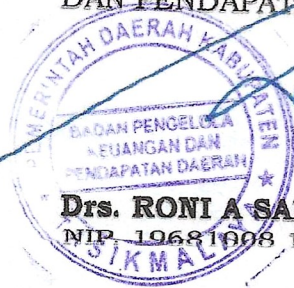

Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 000.9.2/KEP.26/BPKPD/2025
TANGGAL : 8 APRIL 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

Penanggung
jawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sekretaris : Perencana Ahli Muda
Anggota : Kepala Bidang Aset Daerah
: Kepala Bidang Anggaran
: Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
: Kepala Bidang Perbendaharaan
: Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah
: Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli
Daerah
: Perencana Ahli Pertama
: Staff Fungsional Umum PEP

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,


Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003
SIKMAL



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505

Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id

SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 000.7.2.6/KEP.42/BPKPD/2025

LAMPIRAN :

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.
- 12.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 146 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 24);
24. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0018 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
25. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021– 2026.

MEMUTUSKAN

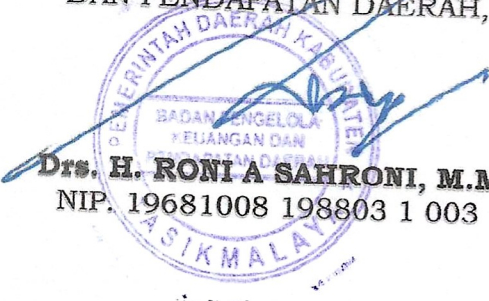
Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya..

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 23 JULI 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,


Drs. H. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Kami dapat melakukan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dalam rangka penyesuaian arah kebijakan untuk mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur serta Bupati terpilih periode Tahun 2025–2029. Perubahan Renja Tahun 2025 memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang didasari pada kondisi, potensi, permasalahan dan tujuan pembangunan daerah Tahun 2025.

Pada awal tahun 2025 Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Sehingga seluruh Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Perangkat Daerah melakukan penyesuaian anggaran dalam rangka tindak lanjut dari kebijakan efisiensi anggaran.

Perubahan Renja Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini. Penyusunan perubahan renja disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPKPD yang merupakan unsur penunjang urusan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Akhir kata, semoga Renja perubahan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target capaian kinerja serta sebagai pedoman pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, 23 Juli 2025

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Tasikmalaya Regional Financial and Revenue Management Body (BPKPD). The stamp contains the text "PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA" around the perimeter and "BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH" in the center. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

Drs. H. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

1 BAB I PENDAHULUAN 1-1

1.1 Latar Belakang..... 1-1

1.2 Landasan Hukum..... 1-6

1.3 Maksud dan Tujuan1-10

1.4 Sistematika Penulisan.....1-11

2 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 2-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah2-19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah.....2-28

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD2-30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat2-43

3 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 3-1

PERANGKAT DAERAH 3-1

4 BAB IV PENUTUP 4-1

DAFTAR TABEL

Tabel T-C29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025..... 2-3

Tabel T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapat Daerah Kabupaten Tasikmalaya..... 2-25

Tabel 2.1 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025..... 2-31

Tabel 3.1 Sasaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan..... 3-1

Tabel 3.2 Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan..... 3-6

Tabel 3.3 Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Subkegiatan..... 3-11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sebagai salah satu perangkat daerah yang mendukung ketercapaian sasaran pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, memiliki kewajiban menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya. Renja digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Tahun 2025 merupakan tahun awal dari pemerintahan Presiden RI, Gubernur serta Kepala Daerah terpilih. Sehingga terdapat perubahan visi misi sasaran serta arah kebijakan yang dilakukan dalam rangka Pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 mempunyai Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dengan 8 Misi Asta Cita 17 Program Prioritas dan 8 Program *Quick Win* serta didukung dengan 320 Program Kerja. Diturunkan kepada Visi Provinsi Jawa Barat “JABAR ISTIMEWA, Lembur Diurus, Kota Ditata” didukung oleh 4 (empat) Misi dan 9 (Sembilan) Langkah (salapan langkah) untuk mewujudkan Visi Misi Jawa Barat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKPD mendukung Misi 4 (empat) Jawa Barat yaitu “Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan dan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance* serta mendukung langkah kasalapan yaitu Birokrasi Melayani Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Maka Perangkat Daerah (PD) termasuk BPKPD Kabupaten Tasikmalaya dapat menyusun Perubahan Renja PD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama Triwulan I) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu:

1. Penyesuaian arah kebijakan untuk mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur serta Bupati terpilih periode Tahun 2025 – 2029;
2. Terdapat perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara

secara lebih efektif dan efisien. Hal yang harus dilakukan efisiensi berdasarkan Inpres tersebut diantaranya:

- a. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
 - b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
 - d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur;
 - e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
3. Terdapat perubahan prioritas program kegiatan yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029;
 4. Terdapat perubahan target pada indikator kinerja tujuan BPKPD untuk tahun 2025-2026 berdasarkan hasil reviu oleh TIM Reviu IKU bahwa hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2024 telah melampaui target pada tahun 2025 dan 2026, sehingga Perlu melakukan penyesuaian target;
 5. Terdapat perubahan target pada indikator kinerja utama BPKPD untuk tahun 2025-2026 berdasarkan hasil reviu oleh TIM Reviu IKU diantaranya:
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
Capaian Indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat pada tahun 2024 memperoleh nilai 87,52 kategori A atau predikat "Sangat Baik". Capaian tersebut juga telah melampaui target pada tahun 2025,

- maka perlu menetapkan target nilai RB di atas capaian Tahun 2024 untuk tahun 2025-2026;
- b. Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan;
- Jumlah Bidang Tanah dan Kendaraan mengalami perubahan pada tahun 2024. Perubahan tersebut dikarenakan adanya revisi hasil dari temuan BPK RI, pemeriksaan lapangan, perhitungan MCP, Hibah dari PSU, hibah atas Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia serta adanya belanja modal tanah/bangunan untuk infrastruktur. Sedangkan untuk bukti kepemilikan kendaraan (BPKB), terdapat perubahan jumlah kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dimana sebelumnya jumlah kendaraan sebanyak 3.240 unit kendaraan menjadi 2.911 unit kendaraan. Perubahan data akan berpengaruh secara signifikan terhadap capaian indikator Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan sehingga perlu penyesuaian target pada tahun 2025 dan 2026 sesuai dengan data yang tersedia;
- c. Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdapat penambahan jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Penambahan pajak itu yaitu Opsen PKB dan BBNKB, sehingga terdapat penambahan target penerimaan pajak daerah yang meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
6. Terdapat rasionalisasi anggaran sebagai tindak lanjut dari efisiensi anggaran dan kebijakan anggaran karena adanya defisit anggaran yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

7. Penambahan atau pengurangan target indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan, serta penambahan/pengurangan dan pergeseran pagu anggaran sub kegiatan;
8. Terdapat penambahan sub kegiatan dalam rangka mendukung implementasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan pengelolaan Retribusi;
9. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran BPKPD Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya TA. 2025 adalah penjabaran dari Renstra BPKPD Kabupaten Tasikmalaya 2021–2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya 2005-2025, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Perubahan Renja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-sasaran yang direncanakan pada BPKPD serta pembangunan pada Pemerintah Daerah tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Provinsi/Pusat.

Berdasarkan DPA Penyusunan Tahun 2025 BPKPD melaksanakan 4 program, 13 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp752.146.009.314,00 yang terdiri dari belanja untuk gaji dan tunjangan ASN BPKPD sebesar Rp32.126.913.147,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp700.883.952.003,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp19.135.144.164,00. Sedangkan pada perubahan renja mengusulkan 2 (dua) sub kegiatan baru, sehingga menjadi 4 program, 13 kegiatan dan 62 sub kegiatan dengan pagu anggaran

hasil efisiensi sebesar Rp742.522.490.392,00 dengan rincian belanja untuk gaji dan tunjangan ASN BPKPD sebesar Rp32.108.113.147,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp694.483.205.210,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp15.931.172.035,00.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 293 dan 330. Penerbitan PP No. 12 Tahun 2019 tersebut mencabut aturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005. Penyempurnaan pengaturan pada PP No. 12 Tahun 2019 tersebut dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 146 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 24);
24. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0018 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
25. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021– 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, serta sebagai bahan pendukung penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP Perangkat Daerah) yang selanjutnya untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPKPD Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025;
2. Menyediakan arahan bagi aparatur BPKPD Kabupaten Tasikmalaya dalam mencapai tujuan dengan implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Menjadi tolok ukur kinerja dalam implementasi program, kegiatan serta sub kegiatan Tahun 2025;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab;
5. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumberdaya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerjanya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II- HASIL EVALUASI RENJA BPKPD KAB. TASIKMALAYA S.D TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BPKPD Kab. Tasikmalaya s.d Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV - PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU S/D TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun sebelumnya dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan serta dijadikan bahan pertimbangan apakah program kegiatan tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga atas dasar evaluasi tersebut dapat diketahui faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja dan kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam sistematika Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta hasil rencana program dan kegiatan. Penyusunan Perubahan Renja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang ingin dicapai;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pada Tahun 2024 BPKPD melaksanakan 4 program, 13 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp737.703.200.417,00 yang terdiri dari belanja untuk gaji dan tunjangan ASN BPKPD sebesar Rp22.836.075.321,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp698.321.517.548,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp16.540.969.025,00. Realisasi anggaran BPKPD sampai dengan Triwulan IV mencapai 98,66% atau sebesar Rp727.206.598.943,00 dengan persentase *output* sebesar 101,25%. Terdapat 59 (Lima puluh sembilan) sub kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dengan *output* 100%, sedangkan terdapat 1 sub kegiatan yang tercapai 175% yaitu sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dimana ditargetkan 4 dokumen dan terealisasi 7 dokumen.

Tahun 2025 BPKPD melaksanakan 4 program, 13 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan total anggaran berdasarkan pagu setelah efisiensi sebesar Rp747.795.627.710,00 dengan rincian belanja untuk gaji dan tunjangan ASN BPKPD sebesar Rp32.126.913.147,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp699.145.117.003,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp16.523.597.560,00. Realisasi anggaran BPKPD sampai dengan triwulan I mencapai 9,26% atau sebesar Rp69.232.562.268,00 dengan persentase *output* kegiatan sebesar 16,97%. Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang telah selesai pada triwulan I yaitu sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD. Realisasi anggaran pada triwulan I masih terbilang rendah karena pelaksanaan kegiatan tersebut menunggu kebijakan pengalokasian anggaran/efisiensi anggaran yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Untuk lebih jelasnya evaluasi Renja sampai Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel TC- 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d TW I Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4)
5	2				KEUANGAN			5.157.411.804.645		2.336.708.321 .181		737.074.467.79 4		727.206.598.9 43	98,66		747.795.62 7.710	3.133.147.482.3 92	60,75
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83 Poin	929.027.583.833	80 Poin	211.392.857.6 74	82 Poin	23.105.075.321	82 Poin	21.623.699.80 1	93,59	83	32.296.960. 247	236.917.713.41 5	25,50
						Nilai IKM Perangkat Daerah	87 Poin	46.129.492.528	86,76	14.867.308.62 1	86,80 Poin	7.137.022.925	86,81 Poin	6.721.487.996	94,18	87	5.576.567.1 90	22.802.523.429	49,43
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	388 Dokumen	1.120.729.900	115 Dokumen	328.838.250	101 Dokumen	269.000.000	101 Dokumen	265.510.178	98,70	106 dokumen	170.047.10 0	644.526.428	57,51
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	91 Dokumen	799.347.400	50 Dokumen	240.745.400	27 dokumen	143.000.000	27 dokumen	140.649.178	98,36	33 dokumen	123.240.000. 00	413.793.078	51,77

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11 = (10/4)	
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	158 Laporan	223.877.500	44 Laporan	41.939.750	-	-					41.939.750	18,73	
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	139 Laporan	97.505.000	117 Laporan	46.153.100	74 dokumen	126.000.000	74 dokumen	124.861.000	99,10	73 dokumen	46.807.100,0 0	188.793.600	193,62
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100%	927.906.853.933	100%	211.064.019.4 24	100%	22.836.075.321	100%	21.358.189.62 3	93,53	100%	32.126.913. 147	236.273.186.98 7	25,46
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 orang/ bulan	927.906.853.933	94 orang/ bulan	211.064.019.4 24	95 Orang	22.836.075.321	95 Orang	21.358.189.62 3	93,53	97 orang	32.126.913.1 47,00	236.273.186.987	25,46
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	100%	2.772.879.100	100%	505.026.341	100%	447.340.000	100%	439.326.156	98,21	100%	149.290.00 0	953.682.497	34,39
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	168.380.000			2 Paket	84.190.000	2 Paket	81.940.000	97,33	2 Paket	61.690.000,0 0	81.940.000	48,66
5	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	169.292.000									0	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4)
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	882 Orang	2.435.207.100	285 Orang	505.026.341	145 Orang	363.150.000	145 Orang	357.386.156	98,41	151 orang	87.600.000,00	871.742.497	35,80
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	13.355.569.301	100%	5.311.816.838	100%	2.331.716.225	100%	2.231.468.727	95,70	100%	1.891.862.707	8.042.592.383	60,22
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	282.050.000	3 Paket	124.887.575	1 Paket	49.999.500	1 Paket	49.418.500	98,84	1 Paket	40.750.000,00	183.248.075	64,97
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Paket	3.463.250.309	9 Paket	1.442.950.404	3 Paket	640.084.800	3 Paket	617.700.350	96,50	3 Paket	506.466.740,00	2.060.650.754	59,50
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	15 Paket	420.253.882	9 Paket	221.219.813	1 Paket	59.997.500	1 Paket	58.698.800	97,84	1 Paket	60.915.967,00	292.639.654	69,63
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	15 Paket	1.182.300.000	9 Paket	360.720.000	1 Paket	115.200.000	1 Paket	101.580.000	88,18	1 Paket	105.000.000,00	481.200.000	40,70
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	3.317.076.150	5 Paket	1.567.231.024	1 Paket	760.169.400	1 Paket	752.290.400	98,96	1 Paket	389.323.000,00	2.666.909.224	80,40

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4)
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20 Dokumen	712.000.000	12 Dokumen	106.580.000	4 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	53.750.000	76,79	4 Dokumen	56.000.000,0 0	170.290.000	23,92
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	5 Paket	259.797.760	2 Paket	79.021.900	-	-	-				79.021.900	30,42	
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60 Laporan	574.080.000	28 Laporan	385.200.000	4 Laporan	180.000.000	4 Laporan	180.000.000	100,00	4 Laporan	180.000.000, 00	610.200.000	106,29
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	2.498.395.200	28 Laporan	949.229.132	4 Laporan	388.165.025	4 Laporan	351.850.677	90,64	4 Laporan	505.000.000, 00	1.343.568.786	53,78
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	446.366.000	1 Dokumen	24.776.990	1 Dokumen	68.100.000	1 Dokumen	66.180.000	97,18	1 Dokumen	48.407.000,0 0	104.863.990	23,49
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	50.000.000	-		-				50.000.000	25,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4)
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100%	10.174.531.937	100%	641.468.500	-	914.731.400		898.081.900	98,18	100%	424.801.200	1.539.550.400	15,13
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	25 Unit	4.005.950.000	-	-	-	-						0	0,00
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	21 Unit	1.131.414.357	4 Unit	197.937.800	1 Unit	81.690.000	1 Unit	75.550.000	92,48			273.487.800	24,17
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	120 Unit	4.631.456.780	30 Unit	403.960.700	43 Unit	833.041.400	43 Unit	822.531.900	98,74	13 Unit	424.801.200,00	1.226.492.600	26,48
5	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	405.710.800	1 Unit	39.570.000	-	-						39.570.000	9,75
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	9.906.920.030	100%	4.705.701.490	100%	1.690.670.500	100%	1.525.825.131	90,25	100%	1.838.950.000	6.711.710.265	67,75
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60 Laporan	5.660.255.120	36 Laporan	2.725.056.006	12 Laporan	993.270.500	12 Laporan	850.993.117	85,68	12 Laporan	1.099.750.000,00	3.815.029.763	67,40

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024						Tingkat Realisasi (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4))
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Laporan	349.742.000	4 Laporan	181.000.000	1 Laporan	63.000.000	1 Laporan	62.000.000	98,41	1 Laporan	88.000.000,00	301.000.000	86,06
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 Laporan	3.896.922.910	36 Laporan	1.799.645.484	12 Laporan	634.400.000	12 Laporan	612.832.014	96,60	12 Laporan	651.200.000,00	2.595.680.502	66,61
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	9.919.592.160	100%	3.703.295.452	100%	1.752.564.800	100%	1.626.786.082	92,82	100%	1.271.663.283	5.554.987.884	56,00
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	70 Unit	3.876.624.700	70 Unit	1.826.795.297	70 Unit	902.230.000	70 Unit	784.455.822	86,95	70 Unit	799.990.000,00	2.723.872.469	70,26
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1.665 Unit	2.423.721.460	809 Unit	1.208.615.230	253 unit	460.440.000	253 unit	456.965.260	99,25	143 Unit	282.748.483,00	1.777.865.490	73,35
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3.619.246.000	3 Unit	667.884.925	3 Unit	389.894.800	3 Unit	385.365.000	98,84	3 Unit	188.924.800,00	1.053.249.925	29,10
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	4.126.422.088.024	100%	2.095.792.662.682	100%	701.350.456.448	101,14%	693.603.902.309	98,90	100%	702.583.313.003	2.852.873.650.161	69,14

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024					Tingkat Realisasi (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4))
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	10.150.083.938	100%	4.894.215.901	100%	2.415.072.000	106,82%	2.387.838.983	98,87	100%	2.460.246.500	7.694.285.254	75,81
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	5 dokumen	727.478.000	3 Dokumen	245.910.235	1 Dokumen	62.450.000	1 Dokumen	62.087.560	99,42	1 Dokumen	79.684.000,00	307.997.795	42,34
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	5 Dokumen	707.500.000	3 Dokumen	229.465.585	1 Dokumen	62.450.000	1 Dokumen	61.581.014	98,61	1 Dokumen	79.684.000,00	291.046.599	41,14
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	298 Dokumen	495.978.000	180 Dokumen	221.220.926	59 Dokumen	60.042.000	59 Dokumen	59.738.550	99,49	59 Dokumen	73.568.000,00	280.959.476	56,65
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan VerifikasiPerubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang diverifikasi	298 Dokumen	500.978.000	180 Dokumen	221.936.975	59 Dokumen	57.450.000	59 Dokumen	54.559.975	94,97	59 Dokumen	73.568.000,00	276.496.950	55,19
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	298 Dokumen	483.700.000	180 Dokumen	187.020.580	59 Dokumen	72.500.000	59 Dokumen	70.853.988	97,73	59 Dokumen	67.003.500,00	318.407.418	65,83
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang diverifikasi	298 Dokumen	421.910.000	180 Dokumen	206.633.886	59 Dokumen	66.440.000	59 Dokumen	66.198.531	99,64	59 Dokumen	69.893.500,00	272.832.417	64,67
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	1.516.806.500	6 Dokumen	598.521.631	2 Dokumen	234.200.000	2 Dokumen	231.983.618	99,05	2 Dokumen	149.783.000,00	830.505.249	54,75

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4))
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	1.659.425.000	6 Dokumen	650.480.784	2 Dokumen	228.290.000	2 Dokumen	227.161.523	99,51	2 Dokumen	155.683.000, 00	877.642.307	52,89
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	8 Dokumen	411.000.000	13 Dokumen	204.851.351	4 Dokumen	613.980.000	7 Dokumen	604.863.320	98,52	5 Dokumen	717.283.000, 00	976.301.431	237,54
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	5 Dokumen	2.037.132.500	3 Dokumen	1.364.492.921	1 Dokumen	607.394.000	1 Dokumen	602.813.248	99,25	1 Dokumen	619.221.000, 00	2.061.421.869	101,19
5	2	2	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1.192 Orang	1.188.175.938	1.232 Orang	763.681.027	318 Orang	349.876.000	318 Orang	345.997.656	98,89	398 Orang	374.875.500, 00	1.200.673.743	101,05
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	3.317.482.600	100	950.102.478	100	492.461.000	100	475.257.886	96,51	100%	404.198.00 0	1.531.051.364	46,15
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	177 Dokumen	465.499.500	59 Dokumen	92.725.000	-	-					92.725.000	19,92	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4))
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	708 Dokumen	314.999.500	-	0	236 Dokumen	52.050.000	236 Dokumen	51.007.500	98,00	236 Dokumen	49.970.000,0 0	61.535.500	19,54
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 Dokumen	865.041.375	36 Dokumen	380.224.243	12 Dokumen	181.200.000	12 Dokumen	173.493.861	95,75	12 Dokumen	195.752.000, 00	602.252.104	69,62
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6 Dokumen	314.999.500	-	0	2 dokumen	119.211.000	2 dokumen	110.810.550	92,95	2 Dokumen	26.266.000,0 0	110.810.550	35,18
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	60 Dokumen	891.942.975	36 Dokumen	378.826.335	12 Dokumen	140.000.000	12 Dokumen	139.945.975	99,96	12 Dokumen	132.210.000, 00	565.401.310	63,39

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11 = (10/4)	
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	98.326.900	-	-					98.326.900	65,55	
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota	195 Dokumen	314.999.750	-	-	-	-					0	0,00	
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	6.416.479.490	100%	1.770.444.993	100%	745.500.000	100%	650.619.356	87,27	100%	573.751.500	2.505.598.349	39,05
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	64 Dokumen	938.500.000	32 Dokumen	228.250.367	16 Dokumen	143.930.000	16 Dokumen	123.007.865	85,46	14 Dokumen	89.850.000,00	359.258.232	38,28

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4))
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	85 Laporan	880.038.000	51 Laporan	364.604.192	15 Laporan	109.900.000	15 Laporan	79.033.953	71,91	17 Laporan	86.812.000,0 0	459.638.145	52,23
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	4 Dokumen	655.000.000	2 Dokumen	94.521.872	3 Laporan	132.000.000	3 Laporan	126.022.899	95,47	3 Laporan	161.300.000, 00	281.078.771	42,91
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Dokumen	1.353.815.000	6 Dokumen	581.683.725	2 Dokumen	152.150.000	2 Dokumen	130.009.654	85,45	2 Dokumen	113.266.500, 00	711.693.379	52,57
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	16 Dokumen	1.011.077.490	2 Dokumen	243.627.226	-	-					243.627.226	24,10	
5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	4 Dokumen	630.000.000	2 Dokumen	69.687.688	1 Dokumen	66.550.000	1 Dokumen	55.433.526	83,30	1 Dokumen	24.538.000,0 0	125.121.214	19,86

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4))
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	310 orang	520.049.000	239 orang	141.094.168	123 Orang	90.000.000	123 Orang	87.004.497	96,67	128 Orang	47.985.000,00	228.098.665	43,86
5	2	2	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	160 Lembaga	428.000.000	40 Lembaga	46.975.755	40 Lembaga	50.970.000	40 Lembaga	50.106.962	98,31	41 Lembaga	50.000.000,00	97.082.717	22,68
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	4.106.538.041.996	100%	2.088.177.899.310	100%	697.697.423.448	100%	690.090.186.084	98,91	100%	699.145.117.003	2.841.142.715.194	69,19
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	60 Laporan	3.815.124.788.867	36 Laporan	1.985.037.534.300	12 Laporan	652.316.034.000	12 Laporan	652.151.034.000	99,97	12 Laporan	651.393.740.000,00	2.697.985.468.300	70,72
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	5 Laporan	233.897.874.625	3 Laporan	76.804.582.010	1 Laporan	30.951.050.997	1 Laporan	26.020.100.684	84,07	1 Laporan	28.776.605.000,00	104.902.412.494	44,85
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	5 Laporan	57.515.378.504	3 Laporan	26.335.783.000	1 Laporan	14.430.338.451	1 Laporan	11.919.051.400	82,60	1 Laporan	18.974.772.003,00	38.254.834.400	66,51

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4))
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	89%	8.725.325.000	84,68%	2.125.373.912	86%	956.852.100	0,83	955.508.449	99,86	83,49%	1.616.293.500	3.178.941.861	36,43
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	8.725.325.000	100%	2.125.373.912	100%	956.852.100	100%	955.508.449	99,86	83,49%	1.616.293.500	3.178.941.861	36,43
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	8 Dokumen	1.300.295.705	6 Dokumen	370.478.080	2 Dokumen	131.267.000	2 Dokumen	130.673.408	99,55	2 Dokumen	100.915.000,00	502.361.488	38,63
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	10 Dokumen	310.000.000	10 Dokumen	77.915.785	2 Dokumen	31.735.100	2 Dokumen	31.735.100	100,00	2 Dokumen	19.088.000,00	109.650.885	35,37
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	600.000.000			-	-					0	0,00	
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	21 Laporan	1.975.088.225	17 Laporan	1.060.579.425	2 Laporan	539.850.000	2 Laporan	539.204.941	99,88	2 Laporan	1.111.747.500,00	1.625.364.366	82,29
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah;	6 Dokumen	1.500.000.000	-	-	-	-					0	0,00	
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	60 laporan	1.068.000.000	36 laporan	469.970.932	12 laporan	254.000.000	12 laporan	253.895.000	99,96	12 Laporan	384.543.000,00	795.135.432	74,45

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4))
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mngikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kab/Kota	329 Orang	1.971.941.070	60 Orang	146.429.690	-	-					146.429.690	7,43	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100%	47.107.315.260	100%	12.530.118.29 2	100%	4.525.061.000	100%	4.302.000.388	95,07	100%	5.722.493.7 70	17.374.653.526	36,88
5	2	4	2.01		Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100%	47.107.315.260	100%	12.530.118.29 2	100%	4.525.061.000	100%	4.302.000.388	95,07	100%	5.722.493.7 70	17.374.653.526	36,88
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	8 Laporan	860.000.000	-	0	1 dokumen	284.671.000	1 dokumen	281.803.271	98,99	1 dokumen	154.549.500, 00	314.323.271,00	36,55
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	1.800.000.000	2 Dokumen	261.462.266	2 dokumen	584.655.000	2 dokumen	528.487.971	90,39	2 dokumen	173.443.000, 00	836.705.237	46,48
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	16 Laporan	1.860.000.000	8 Laporan	225.319.277	4 Laporan	106.495.000	4 Laporan	105.410.996	98,98	4 Laporan	92.109.500,0 0	344.624.773	18,53
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	34 Unit	6.806.923.200	19 Unit	4.035.289.408	29 Unit	1.931.000.000	29 Unit	1.901.299.455	98,46	29 Unit	2.057.650.25 0,00	6.124.755.189	89,98

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4))
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek pajak dan Wajib pajak daerah	12 Laporan	3.112.900.000	9 Laporan	304.103.413	4 Laporan	75.580.000	4 Laporan	74.809.460	98,98	2 Laporan	838.995.500, 00	380.952.873	12,24
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1.500.000.000	-	-	-	-						0	0,00
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	1.285.969 OP	16.051.415.000	300.958 OP	2.797.159.457	-	-				376.400 Objek Pajak	222.480.000, 00	2.797.159.457	17,43
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	5 Layanan	3.933.806.240	14 Layanan	1.919.368.712	1 Layanan	512.550.000	1 Layanan	511.671.210	99,83	1 Layanan	1.090.149.32 0,00	2.615.359.622	66,48
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	24 Dokumen	500.000.000	12 Dokumen	38.185.000	12 Dokumen	43.256.000	12 Dokumen	43.224.000	99,93	12 Dokumen	53.752.700,0 0	85.683.200	17,14
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	60 Dokumen	5.803.351.750	36 Dokumen	2.033.748.405	12 Dokumen	830.970.000	12 Dokumen	705.888.325	84,95	12 Dokumen	762.002.000, 00	2.804.991.850	48,33
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	20 Dokumen	4.578.919.070	12 Dokumen	915.482.354	4 Dokumen	155.884.000	4 Dokumen	149.405.700	95,84	4 Dokumen	277.362.000, 00	1.070.098.054	23,37

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan				
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11 = (10/4)	
5	2	4	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	300.000.000									0	0,00	
Total							100	5.157.411.804.645	101,63	2.336.708.321 .181	100	737.074.467.79 4	101,25	727.206.598.9 43	98,66	100	747.795.62 7.710	3.133.147.482.3 92	60,75

Sumber : BPKPD, diolah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Keberhasilan dalam perencanaan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

**“ DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI,
BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. BPKPD selaku perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung pada misi ke-2 (dua) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional**. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Renstra BPKPD Tahun 2021-2026 tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah

Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Yang Akuntabel Dan Berorientasi Pelayanan Prima dengan indikator tujuan;

- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun sasaran dalam tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah** dengan indikator sasaran;
 - Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah.
2. **Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel** dengan indikator sasaran;
 - Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. **Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel** dengan indikator sasaran;
 - Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan.
4. **Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah** dengan indikator sasaran;
 - Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah.

Secara umum capaian sasaran strategis BPKPD menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun ada beberapa indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Capaian tahun sebelumnya akan menjadi tolak ukur penilaian kinerja untuk tahun berikutnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Realiasi tahun 2024 dari 4 indikator tersebut terdapat 2 (dua) indikator dengan hasil realisasi melampaui

target yang telah ditetapkan yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 111,85% dan Persentase pertumbuhan pajak daerah dengan capaian kinerja 120,27%. Indikator yang sesuai target dengan capaian 100% yaitu Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan untuk indikator persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu ditargetkan tercapai 86% namun terealisasi 82,95%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 pensertipikatan tanah/bangunan milik daerah berfokus pada ruas jalan dan terdapat perubahan data mengenai tanah/bangunan milik pemerintah daerah dari hasil temuan BPK RI, hibah dan belanja modal serta terdapat 346 unit kendaraan yang dihibahkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sehingga mempengaruhi kepada persentase perhitungan BMD yang telah memiliki bukti kepemilikan.

Nilai Reformasi Birokrasi BPKPD pada Tahun 2024 ditargetkan dapat tercapai sebesar 78,25 kategori “A” predikat Sangat Baik. Penilaian RB pada tahun 2024 menggunakan sistem melalui link <https://surabi.jabarprov.go.id>. Penilaian tersebut dilakukan dengan *self assessment* terlebih dahulu dengan nilai 86,61 yang terdiri dari RB General 54,78 dan RB Tematik 32,03. Selanjutnya dilakukan penilaian oleh tim evaluator Internal Kabupaten Tasikmalaya dan tim evaluator Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil akhir, BPKPD memperoleh nilai sebesar 87,52 dengan rincian RB General 55,62 dan RB Tematik 31,89. Hasil akhir tersebut telah melebihi target dan penilaian *self assesment* yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2024 RB BPKPD terealisasi dengan nilai 87,52 kategori “A” predikat Sangat Baik sehingga mencapai kinerja sebesar 111,85% dari target 78,25. Nilai tersebut menjadikan BPKPD sebagai peringkat ke-3 (tiga)

yang memperoleh nilai RB tertinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Indikator Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terealisasi 100%. APBD tahun 2025 telah disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. APBD tahun 2025 telah ditetapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 2 Desember 2024. Dengan telah ditetapkan Perda dan Perbup APBD tahun 2025 pada tanggal 2 Desember 2024, maka penetapan tersebut telah tepat waktu.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan penyusunan, mengkoordinasikan serta menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri secara tepat waktu. Pada tahun 2025 telah melakukan penyusunan dan pelaporan keuangan dengan rincian 11 laporan bulanan 3 laporan triwulanan, 1 laporan semesteran dan 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2024, jumlah dokumen realisasi belanja sebanyak 84 dokumen terdiri dari dokumen belanja bantuan sosial (3 dokumen), dokumen belanja operasional lainnya dan belanja modal (3 dokumen), dokumen belanja tidak terduga (3 dokumen), dokumen belanja pegawai gaji dan tunjangan (3 dokumen), dokumen belanja hibah (3 dokumen), dokumen belanja transfer (3 dokumen), dan dokumen pembiayaan (3 dokumen), dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Sehingga capaian sub indikator pelayanan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 100%.

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi indikator persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 100% sesuai dengan target indikator pada tahun 2024 yaitu 100% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%.

Untuk capaian indikator persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan, jumlah Kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 2.911 unit dan yang telah memiliki bukti kepemilikan yang sah sebanyak 2.527 unit sedangkan untuk bidang tanah sebanyak 742 bidang dengan yang telah bersertifikat sebanyak 503 bidang. Berdasarkan data tersebut maka capaian indikator persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan pada tahun 2024 yaitu 82,94% dengan capaian kinerja sebesar 96,45% dari target 86%. Capaian 2024 tersebut menunjukkan capaian yang lebih lebih rendah dari capaian tahun 2023 dikarenakan terdapat revisi data jumlah bidang tanah dan kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Perubahan tersebut dikarenakan adanya revisi hasil dari temuan BPK RI, pemeriksaan lapangan, perhitungan MCP, Hibah dari PSU, hibah atas Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia serta adanya belanja modal tanah/bangunan untuk infrastruktur. Sedangkan untuk bukti kepemilikan kendaraan (BPKB), terdapat perubahan jumlah kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dimana sebelumnya jumlah kendaraan sebanyak 3.240 unit kendaraan menjadi 2.911 unit kendaraan. Hal tersebut dikarenakan adanya belanja modal berupa 2 unit kendaraan roda empat dan 15 unit roda dua serta

adanya hibah 346 unit kendaraan dari Pemeritah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Target penerimaan pajak daerah Kabupaten Tasikmalaya Pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp110.710.124.764,00, berdasarkan LRA *Preliminary* per tanggal 8 Januari 2025 realisasi yang diterima dari pajak daerah tersebut sebesar 94,13% atau Rp104.211.397.105,00. Hal tersebut dikarenakan terdapat 3 jenis pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya, realisasi Tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Berdasarkan LRA *Preliminary* per tanggal 8 Januari 2025, pajak daerah tersebut tumbuh sebesar 6,23% dari realisasi pajak daerah tahun 2023 yang mencapai Rp98.097.622.047,00. Perhitungan pertumbuhan pajak daerah tersebut dihasilkan dari selisih penerimaan pajak daerah tahun 2024 dengan tahun 2023, lalu dibandingkan dengan tahun 2023 $((\frac{104.211.397.105-98.097.622.047}{98.097.622.047} \times 100\%)) = 6,23\%$. Capaian pertumbuhan pajak tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan, dimana target persentase pertumbuhan pajak daerah untuk tahun 2024 yaitu 5,18% dan tersealisasi 6,23% sehingga persentase capaian kinerja untuk indikator tersebut yaitu 120,27%. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja BPKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

<i>No</i>	<i>Indikator (IKU/ SPM/ IKK/ SDG's)</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target Renstra Perangkat Daerah</i>				<i>Realisasi Capaian</i>		<i>Proyeksi</i>		<i>Catatan Analisis</i>
			<i>Tahun 2023</i>	<i>Tahun 2024</i>	<i>Tahun 2025</i>	<i>Tahun 2026</i>	<i>Tahun 2024</i>	<i>Tahun 2024</i>	<i>Tahun 2025</i>	<i>Tahun 2026</i>	
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	78,019	79	84,50	85	84,007	79	84,50	85	Indikator Tujuan
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	69	78,25	87,6	87,75	87,52	78,25	87,6	87,75	IKU PD
3	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD
4	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	83	86	83,49	84,04	82,95	86	83,49	84,04	IKU PD
5	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	5,11	5,18	51,16	5,05	6,23	5,18	51,16	5,05	IKU PD
6	Persentase PAD	%	10,8	10,91	11,01	11,01	10,064	10,91	11,01	11,01	IKD

No	Indikator (IKU/ SPM/ IKK/ SDG's)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
7	Opini BPK	Interprestasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKD
8	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Interprestasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKD
9	Persentase SILPA	%	2,44	2,19	1,94	1,69	1,014027	2,19	1,94	1,69	IKD
10	Persentase SILPA	%	2,44	2,19	1,94	1,69	1,014027	2,19	1,94	1,69	IKD
11	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	IKD
12	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	4,59	4,49	4,39	4,29	7,281	4,49	4,39	4,29	IKD
13	Rasio PAD (Terhadap PDRB)	%	1,24	1,32	1,41	1,51	0,779	1,32	1,41	1,51	IKD
14	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	60	61	62	63	63,66	61	62	63	IKD
15	Opini Laporan Keuangan	Interprestasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKD
16	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	13,54	13,44	13,34	13,24	2,716	13,44	13,34	13,24	IKD

No	Indikator (IKU/ SPM/ IKK/ SDG's)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
17	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	7,91	7,81	7,71	7,61	5,614	7,81	7,71	7,61	IKD
18	Manajemen Aset		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	IKD
19	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	1,67	1,52	1,38	1,26	1,042	1,52	1,38	1,26	IKD
20	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya ==> pendapatan pemerintah/pdb	%	1,24	1,32	1,41	1,51	0,84	1,32	1,41	1,51	IKD
21	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB ==> pajak daerah/pdb	%	0,25	0,27	0,28	0,3	0,24	0,27	0,28	0,3	IKD

Sumber : BPKPD, diolah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta telah diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022, dimana BPKPD mempunyai tugas yang strategis pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yakni sebagai pengelola keuangan yang berwenang dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset daerah, perencanaan dan penetapan pendapatan daerah, pembinaan pengembangan dan penagihan pendapatan, dan unit pelaksana teknis. Namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKPD pada Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
2. Terdapat perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Masih terdapat 239 bidang tanah yang belum tersertifikasi, hal tersebut dikarenakan terdapat aset tanah/bangunan yang belum *clear and clean* serta kesulitan dalam

penyediaan kelengkapan dokumen untuk proses pensertifikatan;

4. Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
5. Implementasi sistem pada pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah belum dapat berjalan secara optimal;
6. Belum optimalnya perencanaan, pengawasan dan penegakan hukum mengenai pajak dan retribusi daerah;
7. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik mengharuskan BPKPD selalu melakukan perbaikan mutu produk layanan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

BPKPD selaku perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang bertindak dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan, memiliki isu penting yang harus segera diselesaikan. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu-isu yang perlu mendapat perhatian pada BPKPD diidentifikasi sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan ketentuan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tanpa menghambat pencapaian kinerja;
3. Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Penilaian dan pemanfaatan Aset Daerah yang *idle* belum optimal;
5. Pemberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikembalikan ke kabupaten/kota masing-masing pada Tahun 2025.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Rancangan awal Perubahan RKPD tahun 2025 merupakan acuan bagi penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD ini, BPKPD telah melakukan telaahan terhadap Rancangan RKPD tahun 2025. Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan. Namun terdapat pergeseran anggaran antar sub kegiatan dan terdapat pemindahan anggaran yang semula untuk pendataan opsen PKB dan opsen BBKN terdapat pada sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah menjadi dianggarkan pada 39 Kecamatan sehingga terdapat pengurangan anggaran sebesar 780.000.000,00 serta perubahan lainnya berdasarkan hasil dari rapat pimpinan dalam mendukung efisiensi dan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah tahun 2025. Pada Tahun 2025 BPKPD melaksanakan 4 Program 13 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan. Untuk lebih rinci, disajikan dalam Tabel 2.4:

Tabel 2.1
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	(1) Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (2) Nilai IKM Perangkat Daerah	(1) 83 (2) 87	37.873.527.437,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	(1) Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (2) Nilai IKM Perangkat Daerah	(1) 83 (2) 87	37.897.727.437,00	Sekretariat
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106 dokumen	178.047.100,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106 dokumen	170.047.100,00	Sekretariat
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	33 dokumen	123.240.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	33 dokumen	126.941.400,00	-
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	73 dokumen	54.807.100,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	73 dokumen	43.105.700,00	-
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100%	32.126.913.147,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100%	32.108.113.147,00	Sekretariat
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 orang	32.126.913.147,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 orang	32.108.113.147,00	-
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	100%	149.290.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	100%	149.290.000,00	Sekretariat

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	61.690.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	61.690.000,00	-
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	151 orang	87.600.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 orang	87.600.000,00	-
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1.848.862.707,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1.831.962.707,00	Sekretariat
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	40.750.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	40.750.000,00	-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	506.466.740,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	506.466.740,00	-
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	60.915.967,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	60.915.967,00	-
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	105.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	105.000.000,00	-
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	389.323.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	389.323.000,00	-
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	106.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	106.000.000,00	-
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	180.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	130.000.000,00	-

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	412.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	445.100.000,00	-
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	48.407.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	48.407.000,00	-
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	424.801.200,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	476.801.200,00	Sekretariat
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	13 Unit	424.801.200,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	18 Unit	476.801.200,00	-
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	1.873.950.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	1.839.850.000,00	Sekretariat
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	1.134.750.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	1.100.650.000,00	-
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(1) Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	88.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(1) Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	88.000.000,00	-

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	651.200.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	651.200.000,00	-
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	1.271.663.283,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	1.321.663.283,00	Sekretariat
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	70 Unit	799.990.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	70 Unit	799.990.000,00	-
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	143 Unit	282.748.483,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	73 Unit	332.748.483,00	-
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	188.924.800,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	188.924.800,00	-
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	702.583.313.003,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	697.896.401.210,00	Bidang Anggaran
I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100,00%	2.460.246.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100,00%	2.460.246.500,00	Bidang Anggaran
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	1 Dokumen	79.684.000,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	1 Dokumen	79.684.000,00	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	1 Dokumen	79.684.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	1 Dokumen	79.684.000,00	-

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	73.568.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	73.568.000,00	-
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	73.568.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	73.568.000,00	-
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	67.003.500,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	67.003.500,00	-
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	69.893.500,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	69.893.500,00	-
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	149.783.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	149.783.000,00	-
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	155.683.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	155.683.000,00	-
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	5 Dokumen	717.283.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	5 Dokumen	717.283.000,00	-
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	1 Dokumen	619.221.000,00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	1 Dokumen	619.221.000,00	-

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	398 Orang	374.875.500,00	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	398 Orang	374.875.500,00	-
II	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100,00%	404.198.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100,00%	404.198.000,00	Bidang Perbendaharaan
1	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	236 Dokumen	49.970.000,00	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	236 Dokumen	49.970.000,00	-
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	195.752.000,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	195.752.000,00	-
3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	26.266.000,00	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	26.266.000,00	-

NO.	RANCANGAN AWAL RKPД				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	132.210.000,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	132.210.000,00	-
III	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100,00%	573.751.500,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100,00%	548.751.500,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	14 Dokumen	89.850.000,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	14 Dokumen	64.850.000,00	-
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	86.132.000,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	86.132.000,00	-
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	157.140.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	157.140.000,00	-

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	113.266.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	113.266.500,00	-
5	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	30.738.000,00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	30.738.000,00	-
6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	118 Orang	47.305.000,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	118 Orang	47.305.000,00	-
7	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD kabupaten/Kota yang dibina	41 Lembaga	49.320.000,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD kabupaten/Kota yang dibina	41 Lembaga	49.320.000,00	-
IV	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitas Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	699.145.117.003,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitas Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	694.483.205.210,00	Bidang Perbendaharaan
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	12 Laporan	651.393.740.000,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	12 Laporan	645.565.440.000,00	-

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 Laporan	28.776.605.000,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 Laporan	28.958.933.400,00	-
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	18.974.772.003,00	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	19.958.831.810,00	-
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Telah Dilengkapi Dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	89,00%	1.616.293.500,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Telah Dilengkapi Dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	89,00%	1.616.293.500,00	Bidang Aset Daerah
I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00%	1.616.293.500,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00%	1.616.293.500,00	Bidang Aset Daerah
1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	2 Dokumen	100.915.000,00	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	2 Dokumen	100.915.000,00	-
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 Dokumen	19.088.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 Dokumen	19.088.000,00	-
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	2 Laporan	1.111.747.500,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	2 Laporan	1.111.747.500,00	-
4	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	384.543.000,00	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	384.543.000,00	-

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100,00%	5.622.493.770,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100,00%	5.112.068.245,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD
I	Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100,00%	5.622.493.770,00	Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100,00%	5.112.068.245,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	143.049.500,00	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	143.049.500,00	-
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 dokumen	158.443.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	173.443.000,00	-
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	137.919.500,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	137.919.500,00	-

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	30 Unit	1.988.650.250,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	32 Unit	2.062.308.250,00	-
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	811.612.500,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	231.278.975,00	-
6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	376.400 Objek Pajak	175.847.000,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	94.100 Objek Pajak	175.847.000,00	-
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	1 Layanan	1.090.149.320,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	1 Layanan	1.032.149.320,00	-
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	53.752.700,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	53.752.700,00	-
9	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	12 Dokumen	781.002.000,00	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	12 Dokumen	820.252.000,00	-

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU AWAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	4 Dokumen	92.894.000,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	4 Dokumen	92.894.000,00	-
11	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	27.247.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	27.247.000,00	
12	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	161.927.000,00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	161.927.000,00	
JUMLAH				747.695.627.710,00				742.522.490.392,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai amanat Permendagri nomor 86 Tahun 2017 pasal 6 ayat 6 bahwa rencana pembangunan daerah harus bersifat partisipatif yakni merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

BPKPD Kabupaten Tasikmalaya telah memfasilitasi usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat melalui kegiatan forum Perangkat Daerah BPKPD. Forum Perangkat daerah telah dilaksanakan pada tanggal 21 Februari Tahun 2024 melalui media daring dan luring. berdasarkan kegiatan tersebut tidak terdapat usulan dari seluruh *stakeholder* yang hadir terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan BPKPD tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Tujuan, Sasaran, Strategis dan kebijakan selanjutnya harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja serta pendanaan indikatif selama tahun 2025. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mendukung Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, sesuai dengan tugas dan fungsi BPKPD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah. Pada tahun 2025 merupakan tahun awal dalam implementasi Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) khususnya pengelolaan opsen PKB dan BBNKB sehingga BPKPD berfokus pada **“Optimalisasi PAD melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah”**.

Pada perubahan tahun 2025 BPKPD merencanakan 4 Program 13 Kegiatan dan 62 Sub kegiatan, serangkaian program kegiatan dan sub kegiatan telah ditetapkan untuk mencapai tujuan sasaran Perangkat Daerah. Berikut rekapitulasi sasaran dan program/kegiatan/sub kegiatan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Perubahan Tahun 2025:

Tabel 3.1

Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Tasikmalaya

NO	SASARAN PD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
I		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NO	SASARAN PD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
III		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7		Fasilitasi Kunjungan Tamu
8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
V		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
I		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

NO	SASARAN PD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
5		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
6		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
9		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
10		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
11		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
II		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1		Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
2		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
3		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
4		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
III		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
1		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
2		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
3		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
6		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
7		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
IV		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
3		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
C	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
I		Pengelolaan Barang Milik Daerah

NO	SASARAN PD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1		Penyusunan Standar Harga
2		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3		Pengamanan Barang Milik Daerah
4		Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
D	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
I		Pengelolaan pendapatan Daerah
1		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
8		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
9		Penagihan Pajak Daerah
10		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
11		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
12		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Visi Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 yaitu “JABAR ISTIMEWA” (Lembur Diurus Kota Ditata) yang didukung dengan 4 Misi dan dijabarkan dalam 9 langkah yang dilakukan untuk mencapai Visi Misi Provinsi Jawa Barat. BPKPD merupakan Perangkat Daerah sebagai fungsi penunjang mendukung misi ke 4 yaitu Memperkuat Transformasi Birokrasi Yang Berorientasi Terhadap Mutu Pelayanan Publik Yang Bermartabat, Efektif, Efisien Menjungjung Tinggi Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Bersih (*Clean Governance*) dengan melakukan langkah berupa Birokrasi melayani masyarakat.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yaitu “Pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing dan inovasi daerah” yang didukung oleh Prioritas Pembangunan Daerah. Hal tersebut disusun berdasarkan isu strategis serta memuat

janji Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2025 sangat erat. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, meliputi:

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting;
3. Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan;
7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
8. Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peningkatan Kemandirian Desa.

Berdasarkan Prioritas Pembangunan yang tercantum pada RKPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025, BPKPD mendukung pembangunan melalui Prioritas Pembangunan Daerah nomor 8 yakni Inovasi Pelayanan Publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terus dilakukan, khususnya untuk pajak dan retribusi. Digitalisasi pajak dan retribusi akan mempermudah masyarakat dalam pelaporan dan pembayaran pajak dan retribusi. Peningkatan kualitas layanan akan meningkatkan partisipasi dan kepatuhan para wajib pajak dan wajib retribusi.

Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan harus mendukung terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu

strategi, strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai suatu keadilan gender sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Tujuan dari PUG adalah memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan telah setara dan adil bagi laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya. Sehingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan harus memperhatikan aspek dalam mendukung PUG tersebut.

Pada penyusunan awal tahun 2025 pagu anggaran BPKPD sebesar Rp752.146.009.314,00 namun karena ada kebijakan efisiensi maka anggaran tersebut menjadi Rp747.795.627.710,00 pada pergeseran anggaran. Sedangkan untuk perubahan anggaran tahun 2025 BPKPD direncanakan melaksanakan 4 program 13 kegiatan dan 62 sub kegiatan dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp742.522.490.392,00.

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Perubahan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.897.727.437,00	Sekretariat
<i>I</i>	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.047.100,00	Sekretariat
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	126.941.400,00	-
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.105.700,00	-
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.108.113.147,00	Sekretariat
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.108.113.147,00	-
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.290.000,00	Sekretariat
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	61.690.000,00	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	87.600.000,00	-
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.831.962.707,00	Sekretariat
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.750.000,00	-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	506.466.740,00	-
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.915.967,00	-
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000,00	-
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	389.323.000,00	-
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	106.000.000,00	-
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	130.000.000,00	-
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	445.100.000,00	-
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48.407.000,00	-
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	476.801.200,00	Sekretariat
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	476.801.200,00	-
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.839.850.000,00	Sekretariat
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.100.650.000,00	-
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.000.000,00	-
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	651.200.000,00	-
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.321.663.283,00	Sekretariat
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	799.990.000,00	-
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	332.748.483,00	-
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	188.924.800,00	-
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	697.896.401.210,00	Bidang Anggaran
I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.460.246.500,00	Bidang Anggaran
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	79.684.000,00	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	79.684.000,00	-
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	73.568.000,00	-
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	73.568.000,00	-
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	67.003.500,00	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	69.893.500,00	-
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	149.783.000,00	-
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	155.683.000,00	-
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	717.283.000,00	-
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	619.221.000,00	-
11	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	374.875.500,00	-
II	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	404.198.000,00	Bidang Perbendaharaan
1	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	49.970.000,00	-
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	195.752.000,00	-
3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	26.266.000,00	-
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	132.210.000,00	-
III	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	548.751.500,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	64.850.000,00	-
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	86.132.000,00	-
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	157.140.000,00	-
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	113.266.500,00	-
5	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	30.738.000,00	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	47.305.000,00	-
7	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	49.320.000,00	-
IV	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	694.483.205.210,00	Bidang Perbendaharaan
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	645.565.440.000,00	-
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	28.958.933.400,00	-
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	19.958.831.810,00	-
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.616.293.500,00	Bidang Aset Daerah
I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.616.293.500,00	Bidang Aset Daerah
1	Penyusunan Standar Harga	100.915.000,00	-
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	19.088.000,00	-
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.111.747.500,00	-
4	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	384.543.000,00	-
D	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.112.068.245,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD
I	Pengelolaan pendapatan Daerah	5.112.068.245,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	143.049.500,00	-
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	173.443.000,00	-
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	137.919.500,00	-
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2.062.308.250,00	-
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	231.278.975,00	-
6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	175.847.000,00	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.032.149.320,00	-
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	53.752.700,00	-
9	Penagihan Pajak Daerah	820.252.000,00	-
10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	92.894.000,00	-
11	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	27.247.000,00	
12	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	161.927.000,00	
	JUMLAH	742.522.490.392,00	

Tabel 3.3
Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2025

Rencana Perubahan Tahun 2025 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	(1) Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (2) Nilai IKM Perangkat Daerah	(1) Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (2) Nilai IKM Perangkat Daerah		(1) 83 (2) 87	(1) 83 (2) 87	38.816.554.467,00	37.897.727.437,00	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		106 dokumen	106 dokumen	233.000.000,00	170.047.100,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	33 dokumen	33 dokumen	173.000.000,00	126.941.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	73 dokumen	73 dokumen	60.000.000,00	43.105.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

Rencana Perubahan Tahun 2025 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan		100%	100%	32.126.913.147,00	32.108.113.147,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	97 orang	94 orang	32.126.913.147,00	32.108.113.147,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD		100%	100%	482.425.800,00	149.290.000,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Paket	1 Paket	87.425.800,00	61.690.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	151 orang	8 orang	395.000.000,00	87.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		100%	100%	2.438.801.037,00	1.831.962.707,00	

Rencana Perubahan Tahun 2025 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Paket	1 Paket	40.750.000,00	40.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	3 Paket	3 Paket	575.043.340,00	506.466.740,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Paket	1 Paket	60.915.967,00	60.915.967,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	105.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Paket	1 Paket	550.000.000,00	389.323.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	4 Dokumen	4 Dokumen	62.000.000,00	106.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

Rencana Perubahan Tahun 2025 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	4 Laporan	4 Laporan	180.000.000,00	130.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	4 Laporan	4 Laporan	737.532.730,00	445.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Dokumen	1 Dokumen	82.559.000,00	48.407.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	424.801.200,00	476.801.200,00	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	13 Unit	18 Unit	424.801.200,00	476.801.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100,00%	100,00%	1.838.950.000,00	1.839.850.000,00	

Rencana Perubahan Tahun 2025 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	12 Laporan	12 Laporan	1.099.750.000,00	1.100.650.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(1) Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	(1) Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Laporan	1 Laporan	88.000.000,00	88.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	12 Laporan	12 Laporan	651.200.000,00	651.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100,00%	100,00%	1.271.663.283,00	1.321.663.283,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	70 Unit	70 Unit	799.990.000,00	799.990.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

Rencana Perubahan Tahun 2025 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	143 Unit	73 Unit	282.748.483,00	332.748.483,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	3 Unit	3 Unit	188.924.800,00	188.924.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah		100,00%	100,00%	704.787.153.003,00	697.896.401.210,00	
I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100,00%	100,00%	2.662.640.000,00	2.460.246.500,00	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	79.684.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	79.684.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

Rencana Perubahan Tahun 2025 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	59 Dokumen	59 Dokumen	80.000.000,00	73.568.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	59 Dokumen	59 Dokumen	80.000.000,00	73.568.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	59 Dokumen	59 Dokumen	72.500.000,00	67.003.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	59 Dokumen	59 Dokumen	76.000.000,00	69.893.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	2 Dokumen	169.800.000,00	149.783.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	2 Dokumen	169.800.000,00	155.683.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

Rencana Perubahan Tahun 2025 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	5 Dokumen	5 Dokumen	728.770.000,00	717.283.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Dokumen	1 Dokumen	647.394.000,00	619.221.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
11	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	398 Orang	398 Orang	468.376.000,00	374.875.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
II	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100,00%	100,00%	531.261.000,00	404.198.000,00	
1	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	236 Dokumen	236 Dokumen	52.050.000,00	49.970.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

Rencana Perubahan Tahun 2025 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	12 Dokumen	12 Dokumen	220.000.000,00	195.752.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	2 Dokumen	119.211.000,00	26.266.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	12 Dokumen	12 Dokumen	140.000.000,00	132.210.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

Rencana Perubahan Tahun 2025 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
III	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100,00%	100,00%	709.300.000,00	548.751.500,00	
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	14 Dokumen	14 Dokumen	150.000.000,00	64.850.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	17 Laporan	17 Laporan	105.900.000,00	86.132.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	3 Laporan	3 Laporan	161.300.000,00	157.140.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

Rencana Perubahan Tahun 2025 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	2 Dokumen	126.400.000,00	113.266.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Dokumen	1 Dokumen	65.700.000,00	30.738.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	128 Orang	118 Orang	50.000.000,00	47.305.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
7	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD kabupaten/Kota yang dibina	Jumlah BLUD kabupaten/Kota yang dibina	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	41 Lembaga	41 Lembaga	50.000.000,00	49.320.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

Rencana Perubahan Tahun 2025 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
IV	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100,00%	100,00%	700.883.952.003,00	694.483.205.210,00	
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	651.893.740.000,00	645.565.440.000,00	Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Desa
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	30.015.440.000,00	28.958.933.400,00	Penerimaan Pembiayaan
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	18.974.772.003,00	19.958.831.810,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rencana Perubahan Tahun 2025 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Telah Dilengkapi Dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Telah Dilengkapi Dengan Dokumen Bukti Kepemilikan		89,00%	83,49,00%	1.773.202.000,00	1.616.293.500,00	
I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		100,00%	100,00%	1.773.202.000,00	1.616.293.500,00	
1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Jumlah Standar Harga yang disusun	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Singaparna	2 Dokumen	2 Dokumen	105.165.000,00	100.915.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Singaparna	2 Dokumen	2 Dokumen	21.688.000,00	19.088.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Singaparna	2 Laporan	2 Laporan	1.250.100.000,00	1.111.747.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

Rencana Perubahan Tahun 2025 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
4	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	396.249.000,00	384.543.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
D	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah		100,00%	100,00%	6.769.099.844,00	5.112.068.245,00	
I	Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah		100,00%	100,00%	6.769.099.844,00	5.112.068.245,00	
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 dokumen	256.460.000,00	143.049.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1 dokumen	347.359.844,00	173.443.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rencana Perubahan Tahun 2025 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	4 laporan	4 Laporan	118.109.500,00	137.919.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	29 unit	32 Unit	2.092.425.000,00	2.062.308.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 laporan	1 Laporan	859.495.500,00	231.278.975,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	376.400 Objek Pajak	94.100 Objek Pajak	505.480.000,00	175.847.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 layanan	1 Layanan	1.212.007.000,00	1.032.149.320,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rencana Perubahan Tahun 2025 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 dokumen	12 Dokumen	81.681.000,00	53.752.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
9	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 dokumen	12 Dokumen	838.970.000,00	820.252.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 dokumen	4 Dokumen	457.112.000,00	92.894.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
11	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	27.247.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025 (tahun rencana)							
		Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
12	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	-	1 Laporan	-	161.927.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Total						752.146.009.314,00	742.522.490.392,00

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja BPKPD adalah Program Kerja pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program. Dokumen Renja dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Renja tahun 2025 didasari dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk melakukan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta terdapat perubahan Visi dan Misi Gubernur serta Bupati terpilih periode Tahun 2025–2029. Perubahan renja BPKPD tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan dari pagu anggaran Rp752.146.009.314,00 menjadi sebesar Rp742.522.490.392,00 pada perubahan Anggaran. Perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan DPA Perubahan (DPPA) BPKPD Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga diharapkan tanggapan dan saran dari semua pihak untuk Renja BPKPD yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Singaparna, 23 Juli 2025

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. H. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003